

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BASO
NAGARI SIMARASOK**

Alamat : Anak Ala Jorong Simarasok

Kode pos 26192

**PERATURAN NAGARI SIMARASOK
NOMOR 03 TAHUN 2002**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA
PEMERINTAHAN NAGARI SIMARASOK**

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHA NAHU WATA'ALA

WALI NAGARI SIMARASOK

- MENIMBANG : 1. Bahwa dalam Perda Kab. Agam No. 31/2001 tertera BPRN dipilih oleh rakyat, terdiri dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Generasi Muda. Dipilih oleh rakyat yang dimaksud disini bukan dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh rakyat secara tidak langsung atau bertingkat. Badan Perwakilan Rakyat itu, mewakili unsur-unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Generasi Muda Tingkat Nagari.
2. Sesuai dengan berjenjang naik batanggo turun selain dari unsur-unsur tingkat Nagari dipilih oleh dan mewakili unsur-unsur pada tingkat jorong.
3. Supaya jangan meragukan unsur-unsur tingkat Nagari diberi nama yang berbeda dengan kelompok unsur pada tingkat Jorong. Oleh karena kelompok unsur pada tingkat Nagari sudah ada yang diberi nama dengan Kerapatan seperti Kerapatan Adat Nagari, maka unsur tingkat Nagari lainnya juga diberi nama Kerapatan. Kelompok unsur pada tingkat Jorong yang merupakan kuncupnya diberi nama Lembaga.

4. Yang dimaksud dengan reformasi aspiratif dan demokrasi itu ialah dari bawah keatas (bottom up) dari tingkat Jorong ke tingkat Nagari dan pimpinan dipilih oleh anggota tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
5. Setelah mempelajari secara mendalam sudah seharusnya kita menolak sistem pemerintahan Nagari yang dipakai dalam lima periode yaitu:
 - a. Sistem Jahiliyah yaitu sistem yang dipakai sebelum masuknya agama Islam
 - b. Sistem Pemerintahan Hindia Belanda.
 - c. Sistem Pemerintahan Jepang.
 - d. Sistem Orde Lama
 - e. Sistem Orde Baru.

Kita memakai sistem Pemerintahan Nagari setelah masuknya agama Islam dengan semboyan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitab Allah, Sarak Mangatao adat memakai. Sistem ini ditunjang dengan sistem yang dikembangkan oleh Anak Nagari dizaman revolusi kemerdekaan dan ditunjang dengan globalisasi dan dengan membuat tertulis aturan-aturan itu dengan Perna.

6. Perda Propinsi Sumbar No. 9/2000 Pasal 223 mengatakan, dengan diberlakukannya Perda Propinsi Sumbar No. 9/2000 maka Perda Propinsi Sumbar No. 13/83 dengan peraturan pelaksanaannya serta organisasi bentukannya seperti Kepala Desa dan LKMD, LMD dan lainnya tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi. Peraturan lain yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Perda Propinsi Sumbar No. 9/2000 ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Untuk lebih memperjelas Peraturan diatas diperlukan pembentukan Perna tentang struktur organisasi dan mekanisme kerja pemerintahan organisasi Nagari yang sesuai dengan Perda Propinsi Sumbar No. 9/2000 dan Perda Kab. Agam No. 31/2001.

- MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 2839).
2. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 No. 13).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 No. 35).

DENGAN PERSETUJUAN

**BADAN PERWAKILAN RAKYAT
NAGARI SIMARASOK**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN NAGARI SIMARASOK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PEMERINTAHAN NAGARI SIMARASOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari ialah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kab. Agam.
2. Pemerintah Nagari ialah Pemerintah Nagari bersama Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.
3. Pemerintah Nagari Simarasok ialah Wali Nagari berikut perangkat-perangkatnya sebagai eksekutif.
4. Penduduk Simarasok ialah orang yang berdomisili di Simarasok yang telah mematah ranting, menggali sumua sebagai penduduk Simarasok.

5. Unsur ialah pengelompokan anak Nagari Simarasok yang terdiri atas unsur Ninik Mamak (NM), Alim Ulama (AU), Cadiak Pandai (CP), Bundo Kandung (BK) dan Generasi Muda (GM) sesuai dengan Perda Agam No. 31/2001
6. Ninik Mamak ialah Kepala Kaum yang telah diangkat kaumnya bersama dengan Lembaga Ninik Mamak se Jorong dan telah diberi sakin nan tajam oleh KAN Nagari Simarasok dan telah dilewakan (dibantaikan Kerbau).
7. Alim Ulama (AU) ialah Anak Nagari Simarasok yang telah menamatkan pendidikannya di bidang ilmu agama sekurang-kurangnya D3 atau SLTA jurusan Agama Islam dengan pengalaman dalam bidang agama selama sekurang-kurangnya 10 tahun atau yang dianggap telah setingkat dengan Alim Ulama dan telah didaftar sebagai anggota Alim Ulama pada Jorong dalam Nagari Simarasok.
8. Cadiak Pandai (CP) ialah anak Nagari Simarasok yang telah menamatkan pendidikan umumnya sekurang-kurangnya tingkat D3 atau SLTA kejuruan ataupun umum dengan pengalaman kerja pada bidangnya selama sekurang-kurangnya 10 tahun atau telah dianggap setingkat dengan Cadiak Pandai oleh anggota Cadiak Pandai dan telah didaftar sebagai anggota Cadiak Pandai pada Jorong dalam Nagari Simarasok.
9. Bundo Kandung (BK) ialah perempuan yang dianggap menaruh perhatian dan aktif terhadap nasib golongan perempuan dan telah didaftar sebagai kelompok Bundo Kandung pada Jorong dalam Nagari Simarasok.
10. Generasi Muda (GM) ialah anak Nagari Simarasok yang telah berumur 17 s/d 40 tahun, aktif dalam gerakan dan usaha Generasi Muda dan didaftar sebagai Generasi Muda pada Jorong dalam Nagari Simarasok.
11. Lembaga ialah kelompok orang dalam satu unsur dalam satu Jorong Lembaga dapat berupa Lembaga Ninik Mamak (LNM), Lembaga Alim Ulama (LAU), Lembaga Bundo Kandung (LBK) dan Lembaga Generasi Muda (LGM).
12. Kerapatan atau istilah lain ialah kelompok orang-orang dalam satu unsur yang mewakili Lembaga unsurnya pada tingkat Nagari.
13. Majelis Musyawarah Adat dan Sarak (Mamas) ialah majelis yang mewakili Kerapatan yang ada pada tingkat Nagari. Mamas bertugas mengawasi dan menasehati BPRN dan Pemerintah Nagari, Pengawasan dan teguran Mamas akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Nagari dan BPRN Simarasok
14. Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok ialah Legislatif Nagari yang mewakili unsur NM, AU, CP, BK dan GM.

15. Anak Nagari ialah penduduk Simarasok baik yang berada di kampung ataupun yang berada di rantau.

BAB II

PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 2

Pemerintah Nagari Simarasok

1. Pemerintahan Nagari Simarasok terdiri dari Pemerintah Nagari sebagai Eksekutif dan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai Legislatif.
2. Pemerintah Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari, Wali Nagari berfungsi sebagai Kepala Pemerintah terendah Negara RI dan sebagai pemimpin rakyat. Wali Nagari dipilih langsung oleh Rakyat Nagari.
3. Wali Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari yang terdiri dari seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Urusan, beberapa orang sekretariat dan seorang pesuruh. Sebagai perpanjangan tangan Wali Nagari, tiap-tiap Jorong diangkat seorang Kepala Jorong dengan seorang sekretaris. Semua perangkat dan perpanjangan tangan Wali Nagari dipilih dan diangkat oleh Wali Nagari dengan persetujuan salah seorang pimpinan BPRN.
4. Sebagai seorang pemimpin rakyat Wali Nagari mengkoordinir semua organisasi, kerapatan, lembaga dan badan-badan yang tumbuh ditengah masyarakat.
5. Sesuai dengan fungsi kepemimpinannya itu Wali Nagari mempertanggungjawabkan semua kegiatan, organisasi, kerapatan, lembaga dan badan-badan yang tersebut pada ayat 4 Pasal ini kepada rakyat melalui BPRN.
6. Sesuai dengan kepemimpinannya Wali Nagari berfungsi sebagai:
 - a. Penengah (Arbiter) atas sengketa yang terjadi ditengah masyarakat.
 - b. Menetapkan sanksi terhadap warga masyarakat yang menyimpang dari Peraturan atau aturan adat yang berlaku sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Legislatif Nagari Simarasok

1. Legislatif Nagari bernama Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok dipilih oleh rakyat melalui 5 (lima) unsur yaitu Kerapatan Ninik Mamak Nagari (KNMN), Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN), Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN), Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) dan Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN). Atau dengan kata lain BPRN dipilih oleh untuk mewakili 5 (lima) unsur dalam Nagari Simarasok.
2. BPRN dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan secara kolektif yang terdiri dari Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota.
3. Semua administrasi BPRN dikerjakan oleh Sekretaris BPRN. Sekretaris BPRN ditunjuk oleh Wali Nagari atas persetujuan Ketua BPRN.
4. Sekretaris BPRN mempertanggungjawabkan kerja administrasi kepada Ketua BPRN dan mempertanggungjawabkan uang yang dikeluarkan untuk Kerapatan BPRN kepada Wali Nagari.
5. BPRN menghasilkan Keputusan Pimpinan BPRN, Keputusan BPRN dan bersama Wali Nagari memutuskan Peraturan Nagari dan Keputusan Nagari.
6. Selain dari melegalisasi Keputusan dan Peraturan, BPRN bertugas mengawasi Pemerintah Nagari dan perangkat-perangkat Nagari.
7. BPRN melalui Pemerintah Nagari ikut mengawasi semua organisasi, lembaga, badan dan kelompok yang ada dalam Nagari Simarasok.

Pasal 4

Majelis Musyawarah Adat dan Sarak (Mamas) Nagari Simarasok

1. Majelis Musyawarah Adat dan Sarak adalah kumpulan wakil unsur-unsur Kerapatan Ninik Mamak Nagari (KNMN), Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN), Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN), Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) dan Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN).
2. Mamas bertugas memantau dan menasehati BPRN dan Pemerintah Nagari atas terjadinya penyimpangan pelanggaran Adat Basandi Sarak.
3. Mamas dipimpin oleh 3 (tiga) orang Ketua secara kolektif yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. Pimpinan Mamas dipilih oleh anggotanya tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
4. Anggota dan pimpinan Mamas dikokohkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Simarasok.

BAB III
PEMERINTAH JORONG

Pasal 5

Kepala Jorong

1. Sebagai perpanjangan tangan Wali Nagari Kepala Jorong tidak diperkenankan berbuat dan bertindak diluar aturan yang ada atau bertentangan dengan kebijaksanaan Wali Nagari.
2. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Jorong dibantu oleh seorang Pegawai Sekretariat.
3. Kepala Jorong dapat membuat aturan Tata Laksana dari Peraturan Nagari atau Keputusan Nagari atau Keputusan Wali Nagari.
4. Aturan Tata Laksana Jorong sebagaimana disebut pada Pasal ini ayat 2 diputuskan Kepala Jorong bersama Dewan Jorong.
5. Aturan Tata Laksana tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Nagari, Keputusan Nagari, Keputusan Wali Nagari atau Kebijakan Wali Nagari.
6. Atas kesepakatan Dewan Jorong, Jorong dapat dibagi atas wilayah Kampuang.
7. Kepala Kampuang adalah sebagai perpanjangan tangan Kepala Jorong, tidak dapat berbuat kebijaksanaan sendiri.
8. Kepala Jorong dikokohkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 6

Dewan Jorong

1. Dewan Jorong adalah sebagai pembantu Kepala Jorong dalam pembuatan tata laksana untuk pelaksanaan Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Nagari, Keputusan Nagari, Keputusan Wali Nagari.
2. Dewan Jorong terdiri dari Ketua dan Sekretaris 5 unsur. Lembaga Ninik Mamak Jorong (LNMJ), Lembaga Alim Ulama Jorong (LAUJ), Lembaga Cadiak Pandai Jorong (LCPJ), Lembaga Bundo Kandung Jorong (LBKJ) dan Generasi Muda (GM) se Jorong dipimpin oleh Kepala Jorong.

Pasal 7

Lembaga-lembaga

1. Lembaga-lembaga unsur merupakan pembantu Kepala Jorong.
2. Pada tiap-tiap Jorong dibentuk lembaga-lembaga yang merupakan kumpulan personel unsur se Jorong.
3. Lembaga yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini merupakan Lembaga Ninik Mamak Jorong (LNMJ), Lembaga Alim Ulama Jorong (LAUJ), Lembaga Cadiak Pandai Jorong (LCPJ), Lembaga Bundo Kandung Jorong (LBKJ) dan Lembaga Generasi Muda Jorong (LGMJ).
4. Masing-masing Lembaga dipimpin oleh sekurang-kurangnya 4 orang pimpinan yang terdiri dari 2 orang Ketua, seorang Sekretaris. Jika kegiatan telah memerlukannya dapat dibentuk seksi-seksi.
5. Pimpinan Lembaga dipilih oleh anggota Lembaga tanpa ada intervensi dari pihak lain.
6. Pimpinan Lembaga dikokohkan oleh Wali Nagari.
7. Jika Lembaga mempunyai dana, dana itu disimpan, dititip, dibukukan dan diurus oleh Sekretaris Jorong. Pengurus Lembaga menetapkan Peraturan pemakaiannya.
8. Kepala Jorong diundang hadir setiap rapat anggota.

Pasal 8

Lembaga Ninik Mamak Jorong

1. Lembaga Ninik Mamak atau Lembaga Penghulu atau Lembaga Ninik Mamak enam suku merupakan kumpulan unsur-unsur Ninik Mamak atau kumpulan Datuak-datuak se Jorong.
2. Lembaga Ninik Mamak berkewajiban meregistrasi dan mengkoordinir Ninik Mamak atau Datuak-datuak se Jorong.
3. Lembaga Ninik Mamak bertugas membantu Kepala Jorong menyelesaikan masalah atau kasus sako dan pusako serta menetapkan sanksi bagi pelanggar adat dalam Jorongnya.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Ninik Mamak otomatis menjadi anggota Dewan Jorong.
5. Sidang Lembaga memilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakilnya pada Kerapatan Ninik Mamak Nagari.

6. Menarik kembali (me-recall) wakil unturnya yang tak mampu atau yang melakukan pelanggaran adat dan sarak dari Kerapatan Ninik Mamak dan menggantinya dengan wakil yang baru.
7. Melaporkan kepada Kerapatan Ninik Mamak Nagari secepatnya jika ternyata ada Ninik Mamak yang melakukan pelanggaran adat atau sarak dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 9

Lembaga Alim Ulama Jorong (LAUJ)

1. Lembaga Alim Ulama (LAU) merupakan kumpulan personel Alim Ulama se Jorong.
2. Lembaga Alim Ulama berkewajiban meregistrasi dan mengkoordinir seluruh Alim Ulama se Jorong.
3. Lembaga Alim Ulama bertugas membantu Kepala Jorong menyelesaikan masalah sarak atau kasus sarak atau menetapkan sanksi bagi pelanggar sarak dalam Jorongnya.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Alim Ulama otomatis menjadi anggota Dewan Jorong.
5. Memilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakilnya pada anggota Kerapatan Alim Ulama Nagari.
6. Mengatur dan mengurus harta wakaf, Masjid, MDA, TK Islam dan Mushala.
7. Menarik kembali (me-recall) wakilnya yang tak mampu atau telah melakukan kesalahan adat atau sarak, dari Kerapatan Alim Ulama Nagari dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 10

Lembaga Cadiak Pandai Jorong (LCPJ)

1. Lembaga Cadiak Pandai (LCP) merupakan kumpulan personil Cadiak Pandai se Jorong.
2. Lembaga Cadiak Pandai berkewajiban meregistrasi, mengkoordinir seluruh Cadiak Pandai se Jorong.
3. Lembaga Cadiak Pandai bertugas membantu Kepala Jorong menyelesaikan masalah atau kasus tentang ekonomi, pertanian, pertukangan dan lain-lain diluar masalah sako/pusako dan diluar masalah agama.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Cadiak Pandai otomatis menjadi anggota Dewan Jorong.

5. Memilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakilnya pada Kerapatan Cadiak Pandai.
6. Mengurus masalah teknik, pembangunan, ekonomi, usaha, keuangan dan lain-lain yang tak terkait dengan sako/pusako dan agama.
7. Menarik kembali (me-recall) wakilnya yang tak mampu atau telah melakukan kesalahan adat atau sarak, dari Kerapatan Cadiak Pandai Nagari dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 11

Lembaga Bundo Kandung Jorong (LBKJ)

1. Lembaga Bundo Kandung (LBK) merupakan kumpulan Bundo Kandung se Jorong.
2. Lembaga Bundo Kandung berkewajiban mendaftarkan dan mengkoordinir seluruh Bundo Kandung se Jorong.
3. Lembaga Bundo Kandung bertugas membantu Kepala Jorong menyelesaikan masalah atau kasus tentang urusan kewanitaan.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Bundo Kandung otomatis menjadi anggota Dewan Jorong.
5. Memilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakilnya pada Kerapatan Bundo Kandung.
6. Mengurus masalah kewanitaan.
7. Menarik kembali (me-recall) wakilnya yang tak mampu atau telah melakukan kesalahan adat atau sarak, dari Kerapatan Bundo Kandung dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 12

Lembaga Generasi Muda Jorong (LGMJ)

1. Lembaga Generasi Muda (LGM) merupakan kumpulan personel Generasi Muda se Jorong.
2. Lembaga Generasi Muda berkewajiban mendaftarkan dan mengkoordinir seluruh Generasi Muda se Jorong.
3. Lembaga Generasi Muda bertugas membantu Kepala Jorong menyelesaikan masalah dan kasus kegiatan Generasi Muda se Jorong.
4. Ketua dan Sekretaris Lembaga Generasi Muda otomatis menjadi anggota Dewan Jorong.

5. Memilih dan menempatkan 5 (lima) orang wakilnya pada anggota Kerapatan Generasi Muda Nagari.
6. Mengkoordinir organisasi Generasi Muda dalam bentuk kerja, keamanan dan gotong royong serta olah raga, kesenian dan lain-lain.
7. Menarik kembali (me-recall) wakilnya yang tak mampu atau telah melakukan kesalahan adat atau sarak, dari Kerapatan Generasi Muda dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

BAB IV

KERAPATAN

Pasal 13

Kerapatan

1. Di Nagari Simarasok dibentuk Kerapatan-kerapatan.
2. Kerapatan-kerapatan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ialah:
 - a. Kerapatan Ninik Mamak Nagari (KNMN) Simarasok atau nama lain seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) <Perda Agam NO. 31/2001> Simarasok, Lembaga Adat Nagari (LAN) <Perda Sumbar No. 9/2000>.
 - b. Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN) Simarasok atau nama lain seperti Kerapatan Ulama Nagari (KUN) Simarasok atau nama lain Majelis Ulama Nagari (MUN) <Perda Agam No. 31/2001> Simarasok.
 - c. Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN) Simarasok atau nama lain seperti Kerapatan Cendekiawan.
 - d. Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) Simarasok atau nama lain.
 - e. Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN) Simarasok atau nama lain.
3. Tiap-tiap Lembaga menempatkan 5 (lima) orang wakilnya dalam Kerapatan Nagari yang seunsur.
4. Anggota Kerapatan merupakan wakil yang dipilih dan ditempatkan oleh Lembaga Jorong yang seunsur.
5. Kerapatan dipimpin oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari dua orang Ketua, seorang Sekretaris, Seksi-seksi dapat dibentuk setelah ada kegiatan yang membutuhkannya.
6. Pimpinan Kerapatan dipilih oleh rapat anggota yang quorum.

7. Jumlah anggota Kerapatan ialah jumlah wakil-wakil dari Lembaga yang sama ($5 \times 4 = 20$ orang) dikurangi dengan anggota yang mewakili Kerapatan dalam BPRN dan dikurangi pula dengan anggota yang mewakili Kerapatan dalam Mamas.
8. Pengurus dan anggota Kerapatan dikokohkan dengan surat keputusan Wali Nagari Simarasok.

Pasal 14

Kerapatan Ninik Mamak

1. Kerapatan Ninik Mamak Nagari (KNMN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.
2. Kerapatan Ninik Mamak Nagari (KNMN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang wakilnya dalam Majelis Musyawarah Adat dan Sarak Nagari (MAMASN) Simarasok.
3. Kerapatan Ninik Mamak Nagari Simarasok dapat memanggil kembali (me-recall) anggotanya yang tak mampu atau telah melanggar adat Besandi sarak dari keanggotaan BPRN atau Mamas dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 15

Kerapatan Alim Ulama

1. Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.
2. Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang wakilnya dalam Majelis Musyawarah Adat dan Sarak Nagari (MAMASN) Simarasok.
3. Kerapatan Alim Ulama Nagari (KAUN) Simarasok dapat memanggil kembali (me-recall) anggotanya yang tak mampu atau telah melanggar adat Besandi sarak dari keanggotaan BPRN atau Mamas dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 16

Kerapatan Cadiak Pandai

1. Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.

2. Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang wakilnya dalam Majelis Musyawarah Adat dan Sarak Nagari (MAMASN) Simarasok.
3. Kerapatan Cadiak Pandai Nagari (KCPN) Simarasok dapat memanggil kembali (me-recall) anggotanya yang tak mampu atau telah melanggar adat Besandi sarak dari keanggotaan BPRN atau Mamas dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 17

Kerapatan Bundo Kandung

1. Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.
2. Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang wakilnya dalam Majelis Musyawarah Adat dan Sarak Nagari (MAMASN) Simarasok.
3. Kerapatan Bundo Kandung Nagari (KBKN) Simarasok dapat memanggil kembali (me-recall) anggotanya yang tak mampu atau telah melanggar adat Besandi sarak dari keanggotaan BPRN atau Mamas dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

Pasal 18

Kerapatan Generasi Muda

1. Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok.
2. Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN) Simarasok menempatkan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang wakilnya dalam Majelis Musyawarah Adat dan Sarak Nagari (MAMASN) Simarasok.
3. Kerapatan Generasi Muda Nagari (KGMN) Simarasok dapat memanggil kembali (me-recall) anggotanya yang tak mampu atau telah melanggar adat Besandi sarak dari keanggotaan BPRN atau Mamas dan menggantinya dengan anggotanya yang lain.

BAB V
PEMERINTAHAN SUKU

Pasal 19

Kaum

1. Kaum ialah kumpulan orang-orang yang segaris keturunan matrilineal (garis keturunan menurut ibu) yang dapat dibuktikan dengan sebuah ranji.
2. Ranji dianggap sah setelah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Ninik Mamak se Jorong serta Kepala Jorong.
3. Selanjutnya pengesahan Ranji diatur oleh Kerapatan Ninik Mamak Nagari Simarasok atau Kerapatan Adat Nagari Simarasok.
4. Kaum dipimpin oleh Kepala Kaum. Kepala Kaum diangkat atas kesepakatan anggota Kaum dengan persetujuan Kepala Suku.

Pasal 20

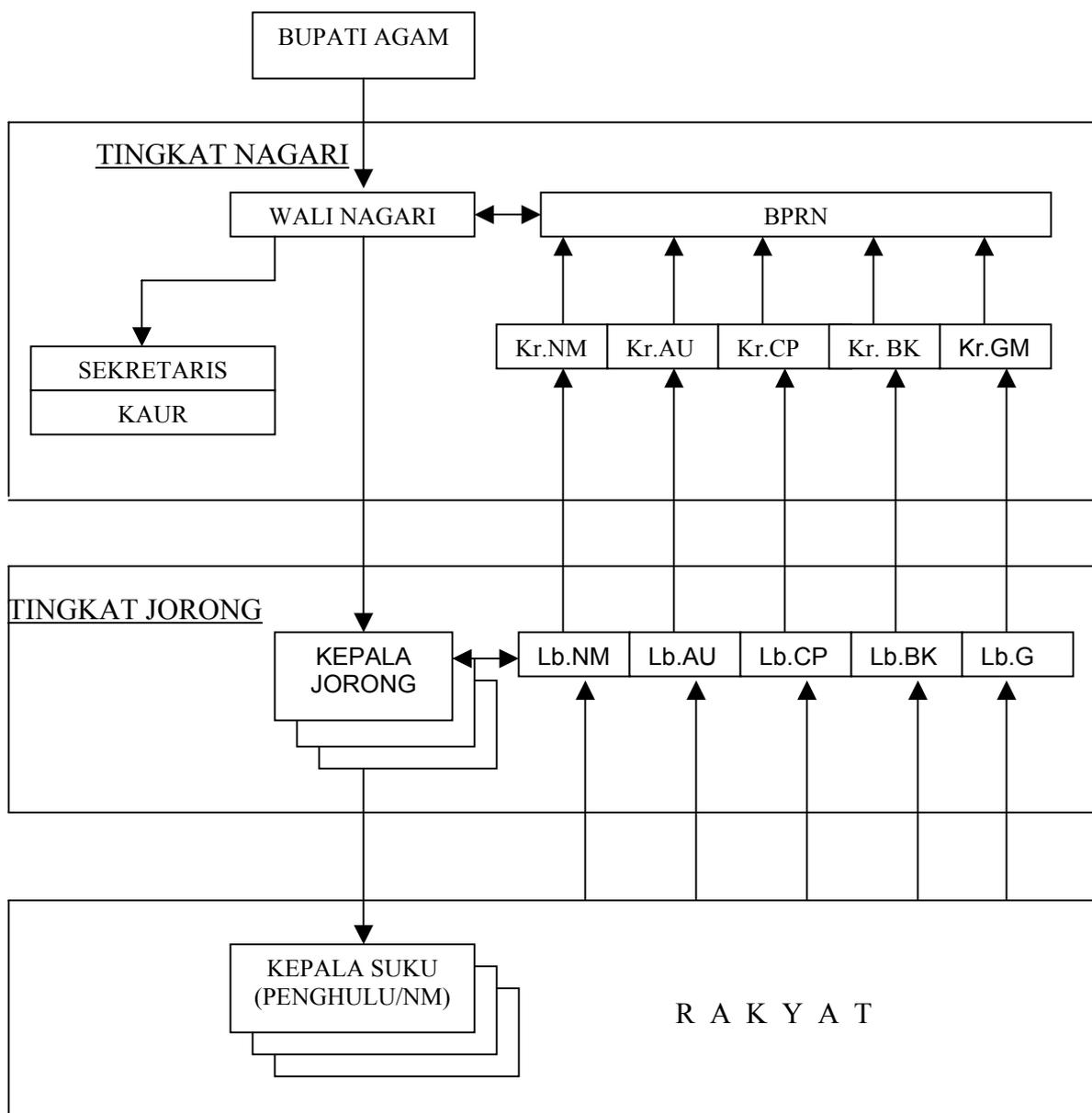
Suku

1. Suku adalah kumpulan satu atau beberapa kaum yang bersepakat sebagai satu payung dan bersepakat mengangkat seorang pimpinan. Pimpinan suku disebut Ninik Mamak atau Penghulu yang diberi gelar Datuak.
2. Kepala Suku dipilih oleh dan diangkat atas persetujuan anggota kaum sesuku atas persetujuan sidang anggota Lembaga Ninik Mamak se Jorong, dikokohkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari atas rekomendasi pengurus Kerapatan Adat Nagari (Kerapatan Ninik Mamak Nagari).
3. Kepala Suku dianggap sah setelah disahkan oleh sidang Ninik Mamak se Jorong yang diadakan di atas rumah gadang suku yang disepakati dilapiak nan takambang di sarok nan di sapu.
4. Pengokohan Penghulu selanjutnya akan diatur oleh Kerapatan Ninik Mamak Simarasok atau Kerapatan Adat Nagari Simarasok.
5. Suku mempunyai perangkat. Di atas Kepala Suku ada Penasehat diberi gelar Angku. Perangkat lainnya ialah:
 - a. Alim Ulama atau Ulama diberi gelar Tuangku
 - b. Cadiak Pandai atau Ilmuan atau Cendekiawan diberi gelar Malin. Malin berasal dari kata Mu'alim.

- c. Dubalang ialah keamanan nan capek kaki nan ringan tangan, disuruh capek pai ditagah capek baranti diberi gelar Sutan. Sutan berasal dari kata Sultan yang artinya panglima angkatan bersenjata diambil dari golongan Generasi Muda.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA
PEMERINTAHAN NAGARI SIMARASOK

Pasal 21



BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

1. Semua organisasi dan mekanisme kerja pemerintahan Nagari Simarasok yang telah pernah ada, tidak berlaku lagi dan keanggotaannya dinyatakan bubar dengan sendirinya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari ini akan diatur lebih lanjut dalam SK Wali Nagari.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Simarasok.

Ditetapkan di Simarasok
Pada tanggal 10 Agustus 2002
Wali Nagari Simarasok

ttd

(H. A. Dt. Rajo Mangkuto)

Diundangkan di Simarasok
Pada tanggal 10 Agustus 2002
Sekretaris Nagari Simarasok

ttd

(Dt. Panduko Reno)

Lembaran Nagari Simarasok
Tahun 2002 No. 04